

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tantangan aktual umat manusia umumnya dan Gereja khususnya adalah pengabaian terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan yang terjadi terutama melalui pelanggaran HAM. Ketika umat manusia mengalami kemajuan dalam aneka bidang kehidupannya, terutama dalam tatanan sosial politik, realitas pengabaian terhadap hak-hak dasar manusia tetap merupakan pengalaman yang jamak ditemukan. Pengabaian terhadap hak-hak dasar menyebabkan sebagian umat manusia tidak dapat menikmati hidup yang wajar seturut keluhuran martabatnya. Bagi mereka, kehidupan yang manusiawi merupakan ideal yang selalu gagal terwujud. Kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM adalah warga masyarakat yang menduduki posisi lemah, baik secara ekonomi, sosial budaya maupun politik. Posisi sosial yang tidak menguntungkan acapkali menjebak dan memojokkan mereka pada posisi korban dari pelbagai bentuk pelecehan martabat dan pelanggaran HAM.

Kaum buruh merupakan kelompok masyarakat yang sangat besar jumlahnya, mencapai puluhan hingga ratusan juta orang, dan memainkan peran penting sebagai penggerak utama perekonomian di berbagai negara. Namun demikian, masih banyak di antara para buruh yang belum merasakan keadilan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka.¹ Sejarah dapat dipahami sebagai catatan panjang tentang berbagai perjuangan yang mendorong perubahan demi terwujudnya keadilan, agar manusia dapat menikmati kehidupan yang layak. Dalam perjalanan pembebasan manusia, kaum buruh senantiasa berada dalam situasi perjuangan, menghadapi berbagai bentuk diskriminasi serta berupaya menuntut hak-hak dasarnya agar dapat hidup secara manusiawi. Buruh adalah salah satu subjek yang dilanggar haknya dan terus berjuang mati-matian demi didapatkannya keadilan dan kehidupan yang layak. Pembentukan *International Labour Organization* (ILO) lahir dari kesadaran

¹https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, diunduh 01 Oktober 2025, pukul 16.45 WIB.

akan adanya ketidakadilan dalam relasi antarmanusia yang tidak dilandasi kesetaraan. Buruh tidak boleh dipandang sebagai komoditas. Oleh karena itu, dalam merumuskan hak asasi manusia dan hak ekonomi, ILO menegaskan bahwa kemiskinan merupakan ancaman bagi kesejahteraan di mana pun.² Hingga kini masalah eksploitasi terhadap buruh dalam dunia ketenagakerjaan telah menorehkan catatan hitam dalam peradaban manusia. Para buruh mengalami proses dehumanisasi dalam pekerjaannya. Hal ini tampak dalam upah yang rendah, beban kerja yang tinggi, dan perlindungan hukum terhadap mereka masih belum terjamin. Hak-hak para buruh sepertinya tidak diperhatikan. Praktik pelanggaran HAM dan ketidakadilan terhadap kaum buruh juga ditemukan di Indonesia yang adalah negara hukum. *De facto* ideal penegakan HAM buruh di Indonesia masih merupakan ideal yang tidak selalu terwujud secara paripurna. Hal ini tampak dalam jaminan penegakan hukum yang lemah atau masalah upah yang tidak menentu yang merupakan sederetan masalah yang masih belum terselesaikan.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang disusul dengan kehadiran mesin-mesin industri dan selanjutnya disebut “revolusi industri” abad ke-19 di Eropa telah mengubah tatanan hidup manusia dalam berbagai bidang. Sejak lahirnya Revolusi Industri, terutama di Inggris, sistem ekonomi kemudian dikonstruksi di atas prinsip akumulasi modal atau kapital.³ Konstruksi ekonomi yang demikian membawa dampak positif dan negatif. Secara positif sistem ekonomi kapitalis ini memicu lahirnya pabrik-pabrik tekstil dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga pekerja-pekerja. Di sisi lain, prinsip akumulasi modal dalam sistem ekonomi kapitalis justru cenderung menempatkan pihak yang lemah dalam posisi rentan, sehingga mudah dieksploitasi oleh mereka yang memiliki kekuatan besar. Orang yang kuat yang dimaksudkan ialah orang yang memiliki modal yang besar. Sementara itu, kelompok yang lemah adalah mereka yang tidak memiliki modal, sehingga terpaksa mengandalkan satu-satunya aset yang mereka miliki, yaitu tenaga kerja, untuk dapat bertahan hidup.⁴

² *Ibid.*

³ Julio De Santa Ana, *Towards A Church of The Poor: The Work of an Ecumenical Group on the Church and the Poor* (Switzerland: World Council of Churches Geneva, 1979), hlm. 37.

⁴ Joe Holland Peter Henriot, S.J. *Social Analysis Linking Faith and Justice* (Washington: The Center of Concern, 1980), hlm. 64-65.

Karl Heinrich Marx, seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman, adalah salah satu tokoh yang menentang sistem ekonomi kapitalis tersebut. Dalam karya terbesarnya “Das Kapital”, dia melancarkan kritik tajam terhadap kapitalisme. Secara eksplisit Marx sebagaimana dikutip oleh Frederick Engels menulis:

We live today under the regime of capitalist production, under which a large and steadily growing class of the population can live only on the condition that it works for the owners of the means of production – tools, machines, raw materials, and means of subsistence – in return for wages. On the basis of this mode of production, the labourer’s cost of production consists of the sum of the means of subsistence (or their price in money) which on the average are requisite to enable him to work, to maintain in him this capacity for work, and to replace him at his departure, by reason of age, sickness, or death, with another labourer – that is to say, to propagate the working class in required numbers.⁵

Dari kutipan di atas tersirat bahwa menurut Marx rezim kapitalis telah mengubah relasi-relasi antarmanusia menjadi relasi antarbarang, komoditas, dan bahwa manusia sendiri akhirnya dilihat dan melihat diri sebagai komoditas yang dikuasai pasar.⁶ Kapitalisme sebagai predator yang tidak membawa kemakmuran bangsa, melainkan kemelaratan mayoritas buruh/pekerja. Mayoritas pekerja hidup dalam kemiskinan dan terjebak dalam krisis ekonomi karena minimnya gaji dan jaminan hidup. Akibat sistem kerja yang eksploitatif, kehidupan mereka seakan diarahkan semata-mata untuk menghasilkan dan menopang akumulasi kapital.⁷

Sejarah eksploitasi tenaga kerja tidak saja dilakukan oleh kaum borjuasi (pemilik modal) tetapi juga oleh Negara. Kalau Thomas Hobbes begitu optimis

⁵ Kita hidup pada masa kini di bawah rezim produksi kapitalis, di mana suatu kelas besar dari penduduk yang jumlahnya terus bertambah, hanya dapat hidup dengan syarat mereka bekerja bagi para pemilik sarana-sarana produksi, seperti alat-alat, mesin-mesin, bahan mentah, dan sarana-sarana penghidupan, sebagai imbalan atas upah. Berdasarkan cara produksi ini, biaya produksi seorang pekerja terdiri dari sejumlah sarana penghidupan (atau nilainya dalam bentuk uang) yang rata-rata diperlukan untuk memungkinkannya bekerja, mempertahankan kemampuan kerjanya, serta menggantikannya ketika ia tidak lagi bekerja karena usia, sakit, atau kematian, dengan pekerja lain. Dengan kata lain, untuk mempertahankan dan memperbanyak kelas pekerja dalam jumlah yang diperlukan. Bdk. Karl Marx, *Wage-Labour and Capital* (German: Neue Rheinische Zeitung, 1849), hlm. 7.

⁶ Ted Benton dan Ian Craib, *Filsafat Ilmu Sosial. Pendasaran Filosofis bagi Pemikiran Sosial*, penerj. Antonius Bastian Lamahekin (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 180.

⁷ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat. Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 270-271.

dengan peran negara sebagai otoritas tertinggi untuk menciptakan keadilan yang mengatasi perang semua melawan semua,⁸ Marx sebaliknya menganggap negara sebagai aktor utama dalam menciptakan ketidakadilan terhadap para buruh. Negara, menurut Marx adalah alat represi dan eksploitasi kelas lebih tinggi terhadap kelas lebih rendah. Dalam pertarungan ini, negara hanya menjadi penjaga malam dan pelayan bagi kapitalis.⁹ Hal ini dengan sangat bagus digambarkan oleh Noreena Hertz, Direktur Eksekutif *Center for International Business Universitas Cambridge*, sebagai berikut:

Ini adalah dunia pengambilalihan diam-diam, dunia pada saat fajar milenium menyingsing. Tangan-tangan pemerintah tampak terikat dan kita semakin hari semakin bergantung pada korporasi. Bisnis sedang menduduki bangku sopir, korporasi menentukan aturan main, dan pemerintah telah menjadi sekadar wasit yang hanya menerapkan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak-pihak lain. Perusahaan-perusahaan yang mudah berpindah (*portable*) dan pemerintah bergerak sangat jauh untuk menarik dan memelihara mereka agar mereka tetap berada di wilayah mereka.¹⁰

Masalah ketidakadilan yang dialami oleh buruh ini dialami juga di Indonesia yang adalah negara hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh dipahami sebagai individu yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah.¹¹ Sementara itu, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan menjelaskan buruh sebagai seseorang yang bekerja pada majikan dengan memperoleh imbalan, baik secara harian maupun bulanan.¹² Dalam perspektif historis, istilah serta gerakan buruh di Indonesia telah muncul sejak masa kolonial. Perkembangan serikat buruh mulai terlihat signifikan pada dekade 1910-an, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia I.¹³ Adapun serikat buruh pertama di Jawa telah dibentuk pada tahun 1905 di sektor

⁸ Di dalam George Schwab, *The Leviathan In State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of A Political Symbol* (London: Greenwood Press, 1996), hlm. xix.

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Esei-Esei Ekonomi Politik* (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 4.

¹⁰ Noreena Hertz, *Penjajahan Kapitalisme*, penerj. Dindin Solahudin (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 17.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 180.

¹² Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2013), hlm. 221.

¹³ Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi* (Malang: INTRANS Publishing, 2014), hlm. viii.

perkeretaapian. Namun, organisasi tersebut masih berada di bawah dominasi pihak Eropa dan hanya melibatkan sebagian kecil buruh pribumi.¹⁴ Dalam bukunya *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Husni Lalu menulis: “Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang dan mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Orang-orang ini disebut sebagai “Blue Collar”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai karyawan/pegawai. Mereka ini digolongkan sebagai “White Collar”. Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi”.¹⁵

Menjelang kemerdekaan pada tahun 1945, serikat buruh menjadi organisasi terpenting khususnya dalam gerakan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam kondisi dan dinamika gerakan buruh dan politik pada masa itu, pemerintah cukup tanggap terhadap kepentingan buruh. Hal ini mendorong lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan perlindungan buruh. Berturut-turut pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk-bentuk Undang-Undang yang melindungi kaum buruh, seperti UU Kecelakaan No. 33/1948, UU Kerja No. 12/1948, UU Pengawasan Perburuhan No. 23/1948, dan UU No. 12/1964 tentang PHK. Berbagai ketentuan itu sangat berkaitan dengan penting dan kuatnya posisi tawar serikat-serikat buruh, apa pun orientasinya dalam percaturan ekonomi dan politik.¹⁶

Pada zaman Orde Baru gerakan serikat buruh di Indonesia mengalami kemunduran. Di bawah kekuasaan Soeharto, serikat buruh mengalami perubahan drastis. Mereka dituduh berkoalisi dengan PKI sehingga pada masa itu serikat buruh yang pro komunis dibubarkan dan dilarang. Satu-satunya serikat buruh yang dibolehkan hanyalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang praktisnya hanya menjadi stempel dari kebijakan pemerintahan Orde Baru pada masa itu.¹⁷

¹⁴ Soegiri DS dan Edi Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh: Zaman Kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 130.

¹⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 33.

¹⁶ Munir, *op.cit.* hlm. 12.

¹⁷ Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 27.

Akan tetapi keadaan menjadi berubah setelah Orde Baru tumbang. Di bawah pemerintahan Presiden Habibie, buruh di Indonesia mendapat perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak mereka dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 yang menjamin hak untuk berserikat bagi buruh. Konvensi ini menandakan demikian:

Kebebasan dan perlindungan hak kaum buruh (Pemerintah Indonesia menyebutnya pekerja) untuk berorganisasi. Kebebasan berorganisasi bisa diterapkan oleh borjuasi untuk memecah belah persatuan massa kaum buruh dalam berbagai organisasi dan melemahkan kekuatan perjuangan kaum buruh. Perlindungan berorganisasi bisa berupa perlindungan borjuasi terhadap serikat buruh yang tunduk kepada politik borjuasi sebagai aparat birokrasinya. Di samping mengenai hak kaum buruh berorganisasi, juga berisi anjuran untuk berunding bersama antara kaum buruh dan majikan. Mengenai berunding bersama, kecenderungannya adalah tercapainya perjanjian kerja kolektif.¹⁸

Terbentuknya serikat-serikat buruh dan diratifikasinya sejumlah kovenan dan Undang-Undang seputar buruh tentunya membawa angin segar bagi bangsa ini untuk bisa keluar dari masalah pelik, yakni kemiskinan, kesenjangan sosial dan pelbagai masalah lainnya. Akan tetapi, kesuksesan negara untuk membuat sejumlah peraturan dan kebijakan belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan kepada para buruh. Ada beberapa kajian yang dibuat untuk melihat sejauh mana regulasi itu diimplementasikan dan apakah perubahan dan kesejahteraan itu bisa dialami oleh para buruh.

Maimun Sholeh dalam tulisannya yang berjudul *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya* di Indonesia mengatakan: “kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha. Kelihatannya ketenagakerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan baik struktural ataupun sektoral”.¹⁹

¹⁸ Soegiri DS dan Edi Cahyono, *op.cit.* hlm. 91.

¹⁹ Maimun Sholeh, “Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 4 Nomor 1, April 2007, hlm. 62.

Sedangkan Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan, SE dalam artikelnya yang berjudul *Masalah Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja* menulis “rendahnya upah buruh di Indonesia disebabkan oleh persediaan tenaga buruh yang melimpah, kurangnya tenaga buruh yang terampil dan juga kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh negara. Konsekuensinya adalah persediaan tenaga kerja yang melimpah menyebabkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dengan kata lain, posisi tawar tenaga kerja lebih rendah dari para majikan”.²⁰

Persoalan lain yang diangkat Indrasari Tjandraningsih, dkk, dalam buku berjudul *Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia* adalah tentang penerapan hubungan kerja kontrak yang menjadi warna dominan hubungan kerja di berbagai pabrik besar dan menengah dan sekaligus menggeser posisi para pekerja tetap. Indrasari Tjandraningsih, dkk, menulis:

Penelitian di sektor otomotif dan elektronik dan perbankan menemukan bahwa dengan diterapkannya hubungan kerja kontrak telah terjadi penurunan jumlah pekerja tetap dan kesejahteraan pekerja. Dalam hubungan kerja kontrak, baik kontrak langsung maupun melalui pihak ketiga, pekerja hanya menerima gaji pokok dan beberapa tunjangan untuk masa tertentu dan ketika hubungan kerja berakhir, pengusaha tidak perlu membayar pesangon. Dengan kata lain, praktik hubungan kerja kontrak telah menciptakan kondisi kerja yang diskriminatif, eksploitatif, degradatif dan fragmentatif.²¹

Terkait kajian Tjandraningsih, dkk, di atas, kasus terakhir yang paling konkrit adalah mengenai UU *Omnibus Law*. Salah satu poin penting dalam UU *Omnibus Law* ialah Undang-Undang Cipta Kerja. Disinyalir bahwa pasal-pasal yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja itu menghambat pada kekuatan pemodal, membuat kepentingan pekerja menjadi marjinal, dan juga mengabaikan isu lingkungan. Para pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan oleh *omnibus law*. Yang paling kasatmata ialah aturan pesangon untuk karyawan yang dipecat turun drastis, dari 32 kali upah menjadi 25 kali. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus batas

²⁰ <https://disnaker.bulelengkab.go.id/artikel/masalah-tenaga-kerja-dan-lapangan-kerja-32>, diakses pada 18 September 2025.

²¹ Indrasari Tjandraningsih, dkk, *Praktek Kerja Kontrak dan Outsourcing Buruh di Sektor Industri Metal di Indonesia* (Bandung: Akatiga-FSPMI-FES, 2010), hlm. 1.

waktu perjanjian kerja waktu tertentu, yang semula dibatasi maksimal dua tahun. Dengan aturan ini, pekerja bisa menjadi pegawai kontrak seumur hidupnya.²²

Berbagai peraturan baru yang tercantum dalam UU Cipta Kerja ini menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.²³ Menurut pandangan Karl Marx, dalam kondisi seperti ini manusia hanya dipandang sebagai komoditi atau materi yang berguna untuk kepentingan para kapitalis dan penguasa.²⁴ Dalam konteks ini para buruh tidak saja dieksploitasi secara ekonomis, tetapi serentak pula mengalami krisis eksistensi. Cara para kapitalis memperoleh keuntungan dari keringat para buruh sebetulnya mereduksi eksistensi manusia sebagai benda yang dapat ditundukkan dan diobjekkan.²⁵

Sehubungan dengan itu, dalam konteks lokal realitas ini dapat ditemukan secara langsung dalam pengalaman para pekerja Buruh Pelabuhan Kedinding Reo di daerah utara pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan ini merupakan salah satu titik strategis gerakan logistik dan distribusi logistik barang ke wilayah Manggarai. Di balik proses pembongkaran barang hampir setiap hari, terdapat kelompok pekerja informal, kaum Buruh Pelabuhan Kedinding Reo, yang telah lama menopang perekonomian lokal tetapi hidup dalam keterbatasan yang banyak. Mayoritas buruh pelabuhan yang menjadi tenaga kerja di Pelabuhan Reo adalah buruh kasar. Buruh kasar ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu buruh dalam dan buruh luar. Buruh dalam adalah mereka yang bekerja membongkar muatan atau peti kemas dari kapal ke pelabuhan. Sementara buruh luar atau akrab dengan sebutan buruh kontainer, adalah mereka yang bekerja membongkar isi muatan yang ada di dalam peti kemas atau kontainer ketika kontainer diangkut dari dalam pelabuhan ke gudang-gudang penyimpanan barang milik pengusaha barang dan jasa atau sebaliknya. Walaupun ada perbedaan penyebutannya, namun keduanya tergabung dalam TKBM Pelabuhan Kedinding Reo. Jumlah mereka saat ini ialah 235 orang.

²² Raymundus Rikang, "Cacat Bawaan Undang-Undang Cipta Kerja", *Majalah Tempo*, Oktober, 2020, hlm. 25.

²³ Maimun Sholeh, *op.cit.* hlm. 72.

²⁴ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 96.

²⁵ Jonathan Martineau, *Time, Capitalism and Alienation: A Socio Historical Inquiry into The Making of Modern Time* (Leiden: Koninklijke Brill nv, 2015), hlm.12.

Sejak berdirinya pada tahun 1980 hingga saat ini para Buruh Pelabuhan Kedindi Reo mengalami persoalan yang sama seperti upah yang tidak layak dan hak-hak buruh yang diabaikan. Persoalan-persoalan ini hampir selalu tidak diangkat ke permukaan sebagai sebuah isu kemanusiaan yang patut diperjuangkan. Masyarakat, pemerintah, bahkan Gereja (agen-agen pastoral) tampak apatis pada apa yang mereka alami. Mereka dituntut bekerja keras tetapi kesejahteraan hidup mereka kurang diperhatikan. Masalah-masalah yang dialami para buruh di atas menuntut perhatian serius untuk melihat kembali sistem kerja dari para buruh, khususnya Buruh Pelabuhan Kedindi Reo di Kabupaten Manggarai. Situasi ini menuntut suatu refleksi yang lebih mendalam dan kritis terhadap makna kerja dan martabat manusia.

Dalam *Laborem Exercens*, kerja dipahami terutama sebagai tindakan personal, di mana manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut citra Allah menjadi subjek dan tujuan utama dari proses kerja.²⁶ Manusia bukan sekadar alat produksi, melainkan pelaku yang mengaktualisasikan dirinya melalui kerja, sehingga *dominium terrae* dipahami terutama sebagai *dominium laboris*, yakni penguasaan manusia atas pekerjaannya sendiri.²⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa martabat manusia tidak bersumber dari kerja atau produktivitas, melainkan dari kenyataan bahwa manusia diciptakan dan ditebus oleh Allah. Kerja dipahami sebagai jawaban manusia atas anugerah tersebut dan sebagai ruang pengembangan diri serta tanggung jawab moral. Perspektif normatif ini menjadi kerangka teologis untuk menilai realitas kerja dan situasi buruh dewasa ini dalam terang ajaran sosial Gereja.

Sejumlah kajian telah dilakukan oleh para peneliti dalam hubungan dengan ketidakadilan yang dialami para buruh. Dari sejumlah penelitian yang telah dibuat, kajian difokuskan pada hubungan antara para buruh dan majikan serta bagaimana negara berperan dalam ranah ini. Dalam konteks lokal di NTT, literatur yang berbicara tentang buruh pelabuhan dan segala permasalahan yang dihadapinya masih belum memadai.

²⁶ Paus Yohanes Paulus II, *Ensiklik Laborem Exercens: Kerja Manusia*, penerj. R. Hardawirjana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1995), art. No. 6, hlm. 18-19.

²⁷ *Ibid.*, art. 7, hlm. 20-21.

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, hanya ditemukan satu karya ilmiah yang secara khusus menyoroti tema ini, yakni tesis karya Octavianus Tiwu Setu berjudul *“Pergulatan Hidup Kaum Buruh Pelabuhan Wuring-Maumere dalam Terang Laborem Exercens.”* Penelitian tersebut mengkaji kehidupan kaum buruh pelabuhan Wuring dalam perspektif ajaran sosial Gereja Katolik, khususnya ensiklik *Laborem Exercens*. Melihat keterbatasan literatur dan minimnya perhatian terhadap buruh pelabuhan di daerah lain, penelitian ini mencoba mengangkat pengalaman Buruh Pelabuhan Kedindi Reo sebagai subjek kajian teologis, dengan tujuan menggali persoalan nyata yang mereka hadapi dan refleksi Gereja terhadapnya. Kajian ini menjadi penting mengingat permasalahan sosial-ekonomi para buruh pelabuhan di wilayah tersebut belum banyak tersentuh, baik oleh pemerintah maupun oleh Gereja Katolik Keuskupan Ruteng. Selain kajian yang berkaitan langsung dengan buruh pelabuhan, sejumlah penelitian lain telah menelaah ensiklik *Laborem Exercens* dari berbagai perspektif teologis dan praktis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis karya Vinsensius Sele (2024). Dalam tesis berjudul *“Kerja: Saranan Realisasi Diri untuk Mengambil Bagian dalam Karya Penebusan Yesus Kristus: Sebuah Refleksi Teologis Makna Kerja dalam Laborem Exercens dan Relevansinya terhadap Formasi di Seminari Todabelu-Mataloko,”* Vinsensius Sele menegaskan bahwa para seminaris di Seminari Todabelu telah menghayati semangat kerja yang selaras dengan ajaran *Laborem Exercens*. Melalui praktik *Opus Manuale*, para seminaris memandang kerja sebagai sarana aktualisasi diri sekaligus partisipasi dalam karya penciptaan dan penebusan Allah. Kerja menjadi jalan pembentukan karakter, pengembangan tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, serta ungkapan kasih terhadap ciptaan. Dimensi pengorbanan dalam kerja dimaknai bukan sebagai beban, melainkan sebagai partisipasi dalam karya penebusan Kristus.

Kedua, Tesis karya Karolus Yohanes Lali Madur (2022). Dalam penelitiannya berjudul *“Makna Kerja bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di SMK PP. St. Isidorus Boawae dalam Perspektif Laborem Exercens dan Implikasinya bagi Proses Pendidikan,”* Karolus Madur menunjukkan bahwa para guru dan tenaga

kependidikan di lembaga tersebut menjalankan pekerjaan mereka sejalan dengan nilai-nilai Kristiani dan ajaran *Laborem Exercens*. Temuannya menegaskan tiga hal utama: (1) pekerjaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai sarana membangun kasih persaudaraan; (2) kerja merupakan aktivitas bebas yang memungkinkan manusia bertumbuh secara utuh; dan (3) pekerjaan adalah bentuk keterlibatan dalam karya penebusan Kristus melalui penghayatan nilai tanggung jawab, pengorbanan, dan kasih.

Ketiga, Skripsi karya Emanuel D. Yato Leba (2021). Dalam skripsinya berjudul “*Konsep Kerja Menurut Laborem Exercens sebagai Upaya Penegakkan Keluhuran Martabat Manusia*,” Emanuel Leba menegaskan bahwa manusia dan kerja merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan. Aktivitas kerja adalah sarana bagi manusia untuk menjadi lebih manusiawi. Dalam perspektif *Laborem Exercens*, kerja merupakan partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah dan wujud konkret keluhuran martabat manusia. Tantangan seperti pandangan materialistik dan individualistik seringkali mereduksi makna luhur kerja. Namun, ensiklik ini mengajak untuk memaknai penderitaan dan perjuangan dalam kerja sebagai bagian dari partisipasi dalam penderitaan dan karya penebusan Kristus.

Keempat, artikel-artikel jurnal. Beberapa penelitian lain juga penulis telusuri pada beberapa artikel tentang *Laborem Exercens*. Tulisan-tulisan tersebut misalnya: Pertama, Theodorus Christian Gunawan, dalam tulisannya membahas tentang sistem pengupahan pegawai paroki dari sudut pandang ensiklik *Laborem Exercens*. Melalui gagasan *Laborem Exercens* ditemukan inspirasi bagi terbentuknya sistem pengupahan yang layak dalam institusi Gereja khususnya di dalam paroki²⁸. Kedua, Yohanes Laki dalam penelitiannya mengulas tentang makna kerja dalam ensiklik *Laborem Exercens* dan *Rerum Novarum*. Dalam ulasannya diterangkan bahwa kerja pada prinsipnya adalah sebagai bentuk tanggung jawab setiap orang sebagai manusia dan bahwa setiap orang wajib diperlakukan secara manusiawi.²⁹ Ketiga, Angela Florida Mau dan Teresia Noiman Derung dalam

²⁸ Theodorus Christian Gunawan, “Sistem pengupahan paroki dalam perspektif ensiklik *Laborem Exercens* Artikel 19: Tinjauan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ajaran Sosial Gereja,” dalam *Felicitas*, Vol. 4, No. 1, Maret 2024.

²⁹ Yohanes Laki, “Menelaah Makna Kerja Dalam Ensiklik *Laborem Exercens* Dan *Rerum Novarum* Serta Implikasinya Pada Permasalahan Dalam Dunia Kerja,” dalam *Jurnal Jumpa* Vol. IV, No. 1, April 2016.

penelitian mereka mengkaji pentingnya menciptakan dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui perspektif *Laborem Exercens* yang menekankan nilai dan martabat manusia dalam konteks pekerjaan.³⁰ Keempat, Viktoria Stela Reyaan dan Teresia Noiman Derung juga melakukan penelitian tentang makna kerja dalam konteks ajaran sosial gereja dengan fokus pada perspektif ensiklik *Laborem Exercens*. Dalam penelitian itu dikemukakan bahwa kerja dipandang sebagai panggilan yang mendalam, di mana setiap individu berkontribusi pada penciptaan dan kesejahteraan masyarakat.³¹ Keenam, Benedictus Eric Hariyanto, dkk membuat sebuah penelitian di sebuah rumah formasi Serikat Misi dengan fokus menghubungkan praktik kerja setiap hari para calon imam dengan aspek dimensi manusiawi berdasarkan perspektif *Laborem Exercens*. Dalam penelitian ditemukan bahwa kerja setiap hari sebuah kesempatan bagi para calon imam untuk mengembangkan talenta dan kemampuan serta memperkuat dimensi manusiawi.³²

Bertolak dari minimnya literatur tentang buruh pelabuhan ini maka penulis coba menggali lebih lanjut dengan mengangkat masalah Buruh Pelabuhan Kedindi Reo sebagai subjek penelitian. Hal ini mendesak mengingat masalah yang mereka hadapi saat ini belum tersentuh oleh berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk Gereja Katolik Keuskupan Ruteng. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji persoalan ketidakadilan yang dialami oleh kaum buruh. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kelompok pekerja di sektor industri besar seperti pabrik, perkebunan, perusahaan tekstil, maupun perusahaan transnasional. Kajian mengenai kelompok buruh pelabuhan, khususnya yang bekerja di wilayah-wilayah terpencil, masih sangat terbatas.

Setelah melakukan perbandingan secara kritis, penulis mengidentifikasi sejumlah aspek kebaruan yang menjadi ciri khas dari penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. *Pertama*, penelitian ini memiliki fokus subjek dan locus yang berbeda, yakni martabat kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo yang

³⁰ Angela Florida dan Teresia Noiman Derung, "Menuju Dunia Kerja yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan *Laborem Exercens* art. 22," dalam *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No 1, Tahun 2025.

³¹ Viktoria Stela Reyaan dan Teresia Noiman Derung, "Menggali Makna Kerja Dalam Konteks Ajaran Sosial Gereja dengan Fokus pada Perspektif Ensiklik *Laborem Exercens*," dalam *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*, Vol. 2, Nomor. 1, Tahun 2025.

³² Benediktus Eric Hariyanto, dkk, "Kerja Harian Formandi Seminari Tinggi CM Dalam Perpspektif *Laborem Exercens* Artikel 26," dalam *Serikat Kecil*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2024.

dikaji dalam perspektif ensiklik *Laborem Exercens*. Penelitian ini menempatkan pengalaman hidup para buruh pelabuhan sebagai titik tolak refleksi teologis untuk memahami makna kerja, martabat manusia, serta implikasinya bagi praksis pastoral Gereja. *Kedua*, penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa buruh pelabuhan merupakan bagian integral dari umat Allah, yakni kelompok kategorial yang seringkali terpinggirkan dalam perhatian pastoral Gereja. Oleh karena itu, tesis ini bermaksud mengusulkan sebuah paradigma pastoral buruh sebagai bentuk konkret kehadiran dan keterlibatan Gereja dalam mendampingi serta memperjuangkan martabat kaum pekerja, khususnya di wilayah Keuskupan Ruteng, yang hingga kini belum memiliki program pastoral yang secara khusus berorientasi pada kelompok buruh pelabuhan.

Riset ini bertujuan menggali dan mendapatkan sebanyak mungkin persoalan yang dialami para Buruh Pelabuhan Kedindi Reo. Diharapkan dengan paparan ini maka kompleksitas persoalan para buruh dapat memperkuat advokasi dari pelbagai elemen masyarakat yang peduli pada hak-hak kaum buruh, terutama Gereja Lokal Keuskupan Ruteng. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji keadaan buruh pelabuhan Kedindi Reo dengan judul: Martabat Kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo Dalam Perspektif Ensiklik *Laborem Exercens*: Sebuah Kemungkinan Pastoral Gereja Keuskupan Ruteng.

1.2 Rumusan Masalah/Research Questions

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana martabat Kaum Buruh Pelabuhan Kedindi-Reo diteropong berdasarkan perspektif Ensiklik *Laborem Exercens* dan implikasinya bagi karya pastoral Gereja Katolik Keuskupan Ruteng. Dari masalah pokok tersebut akan dijabarkan juga beberapa masalah turunan yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. *Pertama*, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo saat ini. *Kedua*, bagaimana perspektif Ensiklik *Laborem Exercens* dalam memandang martabat dan hak-hak buruh. *Ketiga*, bagaimana keadaan kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo dapat dianalisis melalui perspektif *Laborem Exercens*. *Keempat*, apa kemungkinan peran

pastoral Gereja Keuskupan Ruteng dalam merespons kondisi kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi martabat Kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo dalam perspektif Ensiklik *Laborem Exercens* dan implikasinya bagi karya pastoral Gereja Katolik Keuskupan Ruteng. Adapun tujuan umum ini dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut. *Pertama*, menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo. *Kedua*, mengkaji ajaran Ensiklik *Laborem Exercens* tentang martabat dan hak pekerja. *Ketiga*, menganalisis keadaan Buruh Pelabuhan Kedindi Reo dalam perspektif *Laborem Exercens*. *Keempat*, menemukan kemungkinan bentuk pastoral yang dapat dilakukan Gereja Keuskupan Ruteng dalam mendukung kaum buruh.

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang dikaji dalam penelitian ini adalah bahwa perhatian Gereja Katolik Keuskupan Ruteng terhadap buruh pelabuhan Reo, yang diwujudkan melalui pelayanan pastoral, pembinaan iman, dan pendampingan sosial-ekonomi berdasarkan prinsip martabat manusia dan solidaritas kristiani, dapat berpengaruh positif terhadap terwujudnya kesejahteraan hidup para buruh secara integral. Kesejahteraan ini akan tampak dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi buruh. Dalam hal ini, melalui keterlibatannya yang aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, memfasilitasi ruang dialog, serta menumbuhkan kesadaran kritis mengenai nilai kerja dan hak-hak pekerja, Gereja hadir sebagai kekuatan transformatif bagi kehidupan buruh. Perhatian pastoral semacam ini menumbuhkan kemampuan para buruh untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat ikatan solidaritas komunitas, dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam dimensi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, perhatian Gereja tidak semata-mata menghasilkan kesejahteraan lahiriah, tetapi juga memulihkan martabat manusia dan menuntun para buruh menuju kehidupan yang lebih manusiawi dan bermakna dalam terang iman Katolik.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Menambah khasanah kajian teologi sosial, khususnya penerapan ajaran sosial Gereja Katolik dalam konteks buruh pelabuhan.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan rekomendasi konkret bagi Gereja Keuskupan Ruteng dalam mengembangkan program pastoral yang relevan untuk kaum buruh.

3. Manfaat Sosial:

Mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak Buruh Pelabuhan Kedindi Reo melalui pendekatan pastoral dan advokasi sosial.

1.6 Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode campuran (*Mix Method*). Penulis memadukan kajian literatur, data kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan pengalaman hidup nyata kaum buruh. Data kuantitatif dalam bentuk kuesioner dan disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan kondisi umum para buruh. Sedangkan data kualitatif dalam bentuk wawancara dan observasi partisipatif untuk memperdalam gambaran realitas yang dialami oleh kaum buruh.

Metode wawancara dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam tentang identitas, sikap dan pengalaman hidup para Buruh Pelabuhan Kedindi Reo. Proses wawancara dilakukan di markas TKBM Pelabuhan Kedindi Reo dan tempat tinggal beberapa informan dalam suasana informal penuh kekeluargaan. Peneliti berusaha agar kedatangan peneliti tidak dilihat dalam rangka penelitian. Peneliti mengunjungi para informan seperti tamu-tamu pada umumnya. Tujuannya adalah agar para informan bisa membagi pengalaman mereka seobyektif mungkin tanpa ada manipulasi. Proses wawancara dilakukan dalam beberapa kesempatan. Di samping itu, kuesioner akan dibagikan kepada pihak kaum buruh itu sendiri. Penentuan responden ini didasarkan pada lokasi di mana terdapat buruh pelabuhan itu sendiri. Dalam rangka mempermudah pengambilan data, kuesioner ini dibagikan kepada para buruh yang telah berkecimpung dalam kelompok TKBM pelabuhan Kedindi Reo.

Peneliti juga membuat observasi partisipatoris. Observasi Partisipatoris dimaksudkan untuk mendengar dan melihat secara langsung apa yang dialami oleh para Buruh Pelabuhan Kedindi Reo di Kabupaten Manggarai. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai situasi hidup buruh pelabuhan di Reo Kabupaten Manggarai.

Selain wawancara, kuesioner dan observasi partisipatoris, peneliti mengumpulkan data-data sekunder. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi dan arsip Buruh Pelabuhan Kedindi Reo. Arsip-arsip itu antara lain adalah notulensi pertemuan, dokumen-dokumen kegiatan, dan absensi-absensi dari kegiatan-kegiatan bersama. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan untuk mencari dan menelusuri sejarah atau penelitian-penelitian lain tentang buruh pelabuhan. Penelitian data sekunder ini akan berlangsung di perpustakaan STFK Ledalero, perpustakaan pribadi, dan penelusuran internet. Juga yang tidak kalah penting adalah penelusuran Ajaran Sosial Gereja dalam hal ini adalah ensiklik *Laborem Exercens*. Dalam hal ini peneliti menelusuri ensiklik-ensiklik yang menulis dan mengulas tentang konsep-konsep keadilan dan buruh di dalam Ajaran Sosial Gereja tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diteliti secara mendalam. Sementara itu, ditinjau dari pendekatan metodologisnya, penelitian ini menggunakan *mixed methods*, yakni penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

1.6.2 Sumber Data

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan difokuskan pada kajian terhadap ajaran sosial Gereja, khususnya ensiklik *Laborem Exercens*. Kajian ini mencakup analisis mengenai latar belakang historis, tujuan penulisan, serta isi pokok ajaran yang terkandung dalam dokumen tersebut. Sementara itu, penelitian lapangan diarahkan untuk menggali secara mendalam pengalaman hidup

para buruh Pelabuhan Kedindi Reo. Dalam tahap ini, peneliti berupaya mengumpulkan berbagai informasi yang relevan berkaitan dengan bentuk-bentuk advokasi yang pernah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh Gereja, dalam menanggapi persoalan yang dihadapi para buruh di wilayah tersebut. Sebelum pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data, peneliti memperkenalkan diri kepada para informan kunci serta menjelaskan maksud dan tujuan penelitian secara terbuka, agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan etis, transparan, dan membangun hubungan saling percaya antara peneliti dan para partisipan penelitian.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, penulis menempuh beberapa tahapan sistematis sebagai berikut. *Pertama*, penulis melakukan pendekatan awal kepada pihak-pihak berwenang di Pelabuhan Kedindi Reo untuk menyampaikan maksud dan tujuan penelitian secara resmi. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh izin serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. *Kedua*, penulis mengidentifikasi dan mendata para responden, khususnya para buruh yang bekerja di Pelabuhan Kedindi Reo, yang menjadi subjek utama penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu mencari informan kunci tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan yang telah diwawancarai sebelumnya. *Ketiga*, penulis menghubungi informan kunci untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan rencana kegiatan penelitian, sekaligus meminta kesediaan waktu mereka untuk diwawancarai. Waktu wawancara diatur secara fleksibel dengan menyesuaikan jadwal para informan. *Keempat*, penulis melaksanakan wawancara mendalam dengan para informan kunci sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Proses wawancara dilakukan dengan tetap menjaga etika penelitian dan kenyamanan informan. *Kelima*, apabila setelah wawancara masih terdapat informasi yang belum jelas atau data yang perlu dikonfirmasi, penulis melakukan diskusi lanjutan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh (telepon atau pesan elektronik), guna memastikan keakuratan dan kelengkapan data.

Adapun dalam memperoleh data sekunder berupa bahan pustaka, penulis menempuh langkah-langkah berikut. *Pertama*, penulis mengunjungi perpustakaan

untuk menelusuri dan mengumpulkan referensi berupa buku-buku, dokumen resmi, dan literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. *Kedua*, penulis memanfaatkan sumber-sumber digital seperti *Z-Library*, *Google Scholar*, serta jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional untuk memperkaya referensi. *Ketiga*, seluruh bahan pustaka yang diperoleh kemudian dibaca, dipahami, dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan guna menunjang proses penyusunan tesis ini. Dengan prosedur tersebut, diharapkan data yang dikumpulkan memiliki validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis yang memadai, sehingga mampu mendukung temuan penelitian secara komprehensif.

Terkait pengumpulan data dari hasil kuesioner dan wawancara penulis mengelompokkan masalah untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksejahteraan yang dialami oleh para Buruh Pelabuhan Kedindi Reo di Kabupaten Manggarai dalam berbagai bentuk. Hal ini dibuat juga untuk mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan itu ramah terhadap Buruh Pelabuhan Kedindi Reo atau sejauh mana kebijakan-kebijakan pastoral Gereja menyentuh golongan yang lemah dan terpinggirkan ini.

1.6.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. *Pertama*, wawancara dilakukan melalui dialog langsung dengan para buruh sebagai subjek penelitian, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta realitas kerja yang mereka alami. *Kedua*, observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan fenomena yang terjadi di lapangan, guna memperoleh pemahaman kontekstual atas situasi kerja dan dinamika sosial yang menyertainya. *Ketiga*, kuesioner digunakan untuk menghimpun data kuantitatif melalui daftar pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden dengan menggunakan skala likert, sehingga memungkinkan pengukuran sikap, persepsi, dan kecenderungan responden secara sistematis. *Keempat*, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen, arsip, laporan resmi, maupun rekaman yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara, lembar kuesioner, dan catatan lapangan, yang

berfungsi untuk memastikan proses pengumpulan data berlangsung secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.7 Batas/Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan batasan studi sangat membantu penulis agar tetap fokus pada tema yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tulisan ini berfokus pada Martabat Kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo Dalam Perspektif Ensiklik *Laborem Exercens*: Sebuah Kemungkinan Pastoral Gereja Keuskupan Ruteng. Batasan-batasan dari tema ini ialah sebagai berikut. *Pertama*, Lokasi Penelitian. Penelitian ini berlangsung di Pelabuhan Kedindi Reo. Penelitian ini hanya fokus pada kaum buruh pelabuhan Kedindi Reo, Kabupaten Manggarai, serta analisis menggunakan perspektif Ensiklik *Laborem Exercens*. *Kedua*, Subjek Penelitian. Subyek penelitian dalam tulisan ini ialah para Buruh di Pelabuhan Kedindi Reo. Alasan penulis memilih para buruh ialah karena kelompok ini yang menggumuli pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh. Para buruh berjumlah 100 orang yang diambil dari jumlah mereka saat ini. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis bahwa jumlah Buruh Pelabuhan Kedindi Reo yang aktif sampai saat ini ialah 210 orang. *Ketiga*, Ruang Lingkup. Aspek-aspek penting yang akan diteliti dalam tulisan ini ialah aspek sosial-ekonomi buruh, analisis ajaran sosial Gereja terkait kerja dan buruh, serta kemungkinan pastoral yang dapat dikembangkan oleh Gereja Keuskupan Ruteng. *Keempat*, sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini ialah untuk menelaah Martabat Kaum Buruh Pelabuhan Kedindi Reo Dalam Perspektif Ensiklik *Laborem Exercens*: Sebuah Kemungkinan Pastoral Gereja Keuskupan Ruteng.

1.8 Keterbatasan Penelitian

Pertama, Penelitian ini dibatasi pada konteks Keuskupan Ruteng. Hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Gereja Katolik di wilayah lain yang memiliki situasi sosial, ekonomi, dan pastoral yang berbeda. Dalam pandangan penulis, pembatasan penelitian pada konteks Keuskupan Ruteng memungkinkan analisis yang lebih fokus dan mendalam terhadap dinamika pastoral buruh Gereja setempat. Meskipun demikian,

keterbatasan ini mengimplikasikan bahwa temuan penelitian perlu dipahami secara kontekstual dan tidak serta-merta berlaku universal.

Kedua, keterbatasan data lapangan. Keterbatasan data lapangan dalam penelitian ini mencakup terbatasnya jumlah informan serta keterbatasan akses terhadap data yang lebih mendalam. Hal ini berdampak pada analisis yang belum sepenuhnya mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika pastoral buruh Gereja di Keuskupan Ruteng. Keterbatasan ini baik dari segi jumlah informan maupun kedalaman wawancara, dapat memengaruhi kelengkapan analisis mengenai praktik pastoral buruh Gereja yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini hanya menyoroti model-model pastoral tertentu yang relevan dengan tema buruh, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya model pastoral lain yang belum teridentifikasi atau dikaji secara mendalam.

Ketiga, keterbatasan waktu penelitian. Keterbatasan waktu dalam penelitian ini memengaruhi proses pengumpulan data serta kedalaman analisis yang dilakukan. Akibatnya, penelitian ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan dinamika pastoral buruh Gereja secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini juga memengaruhi proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga analisis yang dilakukan belum sepenuhnya menggambarkan dinamika pastoral buruh secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keempat, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah teknik *non-probability sampling*. Salah satu kategori yang dipakai oleh penulis dalam teknik ini yaitu, *Quota non-probability sampling*, artinya pengambilan sampel didasarkan pada kuota yang sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini akan dibagi ke dalam lima bagian utama berdasarkan pokok-pokok persoalan. Kelima bagian utama tersebut memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Kelima pokok bahasan utama ini akan dijabarkan ke dalam bab-bab penting sebagai berikut. Bab pertama akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, metode, dan sistematika penulisan. Bab dua, penulis akan membahas konsep martabat manusia dan Ensiklik *Laborem Exercens*. Bab tiga, penulis akan menjelaskan tentang keadaan buruh

Pelabuhan Kedindi Reo berupa, profil, keadaan sosial-ekonomi serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para buruh pelabuhan. Bab empat, penulis mengkaji data dan membuat analisis data hasil penelitian tersebut. Kemudian, hasil dan pembahasan tersebut dianalisis sesuai kerangka teori. Bab lima adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, merangkum temuan dan memberikan rekomendasi.